



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan menetapkan
penggantian penugasan dalam pelaksanaan Tim Asesor
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim
Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 981 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong

Utara Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan Pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

tereintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;

2. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
3. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT

: Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut

1. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut ;
 - a. Memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Penanggungjawab memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; dan
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Mengkoordinir seluruh anggota anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. Memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam

- pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
4. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. Mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. Melakukan pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. Merumuskan *Area Of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. Membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. Membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia,

RADEYUS SITOANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 42
TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA.

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA.

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Nur Mus Jaefah	Ketua	Pembina
2.	Abdul Khoir Tri Wibowo	Anggota	Pembina
3.	Dahlia	Anggota	Pembina
4.	Marsum	Anggota	Pembina
5.	Suherman	Anggota	Pembina
6.	M. Muslih Adnan	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Adriani Ketty	Kasubbag Yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Radeyus Sitohang	Kasubbag Yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya	Anggota Tim

		Manusia	
9.	Muraidah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informai	Anggota Tim
10.	R. Muharjanto A.P	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim
11.	Sri Kartini	Analisis Pemilihan Umum	Anggota Tim
12.	Gabriel Gerdian P.	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
13.	Tri Nandang Prihantoro	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
14.	M. Ulil Azmi	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
15.	Mulyadi	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
16.	Herwandi	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
17.	Sri kartini	Staf subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
18.	Alitha Elsyeqhi	Staf subbagian	Anggota Tim

		Keuangan, Umum, dan Logistik	
19	Hendriyadi	Staf subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim
20.	Cegy Pradana	Staf subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITOHANG